



PERKUAT PELIMPAHAN KEWENANGAN KE WILAYAH Seluruh Kemantren Evaluasi Standar Pelayanan Publik

YOGYA (KR) - Seluruh kemantren yang ada di Kota Yogya secara periodik melakukan evaluasi atas standar pelayanan publik. Upaya itu dilakukan untuk memperkuat kebijakan pelimpahan sebagian wewenang walikota ke wilayah sesuai Perwal 18/2023.

Total ada 14 kemantren yang tersebar di wilayah. Seluruhnya sudah memiliki standar pelayanan publik serta menjadi tolok ukur program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan. "Kemantren dan kelurahan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh walikota untuk dilaksanakan di tingkat wilayah. Untuk itu standar pelayanan publik menjadi penting agar bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di wilayah punya standar dan kualitas yang sama dengan layanan tingkat lanjutannya," papar Mantri Pamong Praja Kemantren Pakualaman Saptohadi, Rabu (25/9).

Menurutnya saat ini seluruh kemantren juga tengah melakukan evaluasi melalui forum konsultasi publik. Kemantren Pakualaman su-

dah berhasil menjalankannya dengan melibatkan para aparaturnya pemerintah di wilayah, akademisi serta unsur masyarakat. Melalui forum itu masyarakat bisa memahami alur pelayanan sekaligus memberikan masukan yang konstruktif.

Saptohadi mengatakan setiap tahunnya kemantren melakukan survei kepuasan masyarakat sebanyak dua kali. Hal ini untuk mengukur seberapa optimal indeks pelayanan publik yang telah diselenggarakan, sekaligus untuk mengevaluasi agar bisa terselenggara lebih baik.

"Berdasarkan hasil survei terakhir sudah mendapatkan predikat A atau sangat baik. Tetapi bukan berarti tidak ada kekurangan ataupun kelemahan baik dari segi fasilitas sarana prasarana maupun pelayanannya. Sehingga forum

konsultasi publik menjadi penting agar perbaikan terus dilakukan bersama, sekaligus mendorong terciptanya inovasi pelayanan publik," urainya.

Sementara itu akademisi dari Universitas Widya Mataram, Bangun Putra Prasetya, menjelaskan penyelenggaraan pelayanan publik dapat dikatakan berjalan dengan baik ketika ada partisipasi aktif masyarakat. Terutama dalam memberikan saran, masukan serta apresiasi atas pelayanan yang didapatkan.

"Keterlibatan masyarakat dalam pelayanan publik tidak hanya sebagai pengguna atau penerima manfaat saja, tapi juga mengawasi pelaksanaan standar pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Untuk itu seluruh elemen masyarakat, pengurus wilayah dan tokoh masyarakat harus ak-

tif memberikan penilaian baik itu kritik, masukan dan apresiasi yang membangun," jelasnya.

Salah satu pengurus wilayah dari Kelurahan Purwokinanti Kemantren Pakualaman, Jatmiko, mengatakan sangat mendukung keberadaan forum konsultasi publik yang melibatkan elemen warga. Dengan adanya forum tersebut harapannya pelayanan publik yang ada di tingkat wilayah bisa berjalan dengan optimal dan prima.

"Pelayanan di wilayah ini kan ada juga yang nanti berlanjut baik itu melalui aplikasi Jogja Smart Service (JSS) atau Mal Pelayanan Publik (MPP). Sehingga sebagai pintu awal harapannya bisa terselenggara dengan efektif dan efisien untuk berbagai urusan dan kebutuhan warga masyarakat," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005